



PEMERINTAH PROVINSI BALI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

Jl. Kapten Tantular No.1 Niti Mandala, Web : <http://kesbangpol.baliprov.go.id/>
Telp. (0361)255193 Fax (0361) 231788 Denpasar 80235



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

“OM SWASTIASTU”

Puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022”**.

Laporan Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas sebagai persyaratan terwujudnya *Good Governance* dan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, menerapkan sistem pertanggungjawaban yang efisien, efektif, dan transparan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyusun LKjIP Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja instansi berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Secara umum laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja sasaran pada tahun 2022.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP ini saya ucapkan terima kasih. Semoga LKjIP Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan dapat menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan.

“OM SHANTI, SHANTI, SHANTI, OM”

Bali, 15 Pebruari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
I Gusti Ngurah Wiryanata
NIP. 19661231 199303 1 208



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL dan GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	3
1.3 Keadaan Pegawai	19
1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana	21
1.5 Keuangan	21
1.6 Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	22
1.7 Dasar Hukum	23
1.8 Sistematika LKjIP	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 Perencanaan Strategis	27
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	27
2.1.2 Strategi dan Kebijakan	28
2.1.3 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)	32
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	35
2.3 Rencana Anggaran	36
2.3.1 Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	36
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022	40
3.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra	42
3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	42
3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja ...	48
3.6 Realisasi Anggaran	63
BAB IV PENUTUP	70



DAFTAR TABEL dan GRAFIK

Tabel 1.1	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan.....	19
Grafik 1.1	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan.....	19
Tabel 1.2	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat	19
Grafik 1.2	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat	20
Tabel 1.3	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan	20
Grafik 1.3	Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan	20
Tabel 1.4	Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	21
Grafik 1.4	Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	21
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	28
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	31
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Sesuai dengan Usulan Renstra Perubahan Tahun 2021-2023	32
Tabel 2.4	Target Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	33
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	36
Tabel 2.6	Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	36
Grafik 2.1	Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	37
Tabel 2.7	Ringkasan Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021	37
Tabel 2.8	Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis	38
Grafik 2.2	Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis	38
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Tahun 2021.....	41
Tabel 3.2	Realisasi Nilai IDI Tahun 2021 Provinsi Bali	43
Tabel 3.3	Capaian IDI Provinsi Bali Menurut Indikator	44
Tabel 3.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022	45
Tabel 3.5	Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 1	49
Tabel 3.6	Target dan Relisasi Kinerja Sasaran 2	51
Tabel 3.7	Target dan Kinerja Sasaran 3	54



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 3.8	Target dan Kinerja Sasaran 4	56
Tabel 3.9	Target dan Kinerja Sasaran 5	58
Tabel 3.10	Rincian Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021	59
Tabel 3.11	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	64
Tabel 3.12	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2021	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi	18
-----------	---------------------------	----



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



BAB 1

PENDAHULUAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sebagai Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki peranan di dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Selain situasi kondisi umum di Daerah Bali, juga terdapat beberapa situasi khusus yang langsung terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali. Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan permasalahan dalam negeri di Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki tujuan untuk **"Terwujudnya Bali yang Aman, Tertib dan Demokratis"** dengan Isu Strategis yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah antara lain:

- 1) Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa,
- 2) Radikalisme dan terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Provinsi Bali,
- 3) Menurunnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *Multi Culture* secara nasional yang akhirnya berimbas ke daerah,
- 4) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di Media sosial serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda,
- 5) Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali,
- 6) Belum optimalnya pemantauan Ormas dan masih banyaknya Ormas yang belum melaporkan keberadaannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 ini diharapkan dapat :

- 1) Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan sesuai dengan peraturan perundangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Untuk dapat mempercepat pembangunan sarana infrastruktur, ekonomi dan terjaminnya keamanan daerah.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menyelenggarakan fungsi :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 3) Penyelenggaraan administrasi badan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- 5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1.2.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan dan menetapkan program kerja Badan;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- h. Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Kewaspadaan Daerah, Politik Dalam Negeri serta Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- i. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis kesekretariatan, Kewaspadaan Daerah, Politik Dalam Negeri serta Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- k. Menyediakan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota;
- l. Menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- m. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- n. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- o. Menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- p. Menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- q. Menyampaikan saran pertimbangan mengenai bidang kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- r. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
- s. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- u. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

1.2.2 Sekretariat

Sekretariat dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan. Sekretaris membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
- c. Unit Substansi Keuangan.

Sekretaris mempunyai Tugas :

- a) Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b) Memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c) Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d) Menilai prestasi kerja bawahan;
- e) Menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
- f) Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g) Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- h) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan;
- i) Mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
- k) Menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- l) Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- m) Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
- n) Menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- o) Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- p) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q) Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
- r) Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Sub Bagian dan Unit Substansi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas masing Kepala Sub Bagian dan Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - f. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - g. Melaksanakan urusan rumah tangga;
 - h. Melaksanakan administrasi Pegawai ASN;
 - i. Penatausahaan barang milik daerah;
 - j. Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - k. Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- b) Sub Koordinator Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - e. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
 - f. Menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan



Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;

- g. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.
- c) Sub Koordinator Unit Substansi Keuangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - e. Melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - f. Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

1.2.3 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah membawahi :

- a) Unit Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam; dan
- b) Unit Substansi Penanganan Konflik.

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- h. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di wilayah provinsi;
- i. Menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di wilayah provinsi;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di wilayah provinsi;
- k. Mengawasi penyelenggaraan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di wilayah provinsi;
- l. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Fasilitasi Kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan Konflik di wilayah provinsi;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Unit Substansi dipimpin oleh Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas-tugas Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Daerah adalah :

- a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelkam mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- f. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g. Menyiapkan bahan masukan kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga kerja asing dan Lembaga asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- b) Sub Koordinator Unit Substansi Penanganan Konflik mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis dibidang Penanganan konflik;
 - g. Menyiapkan bahan masukan kebijakan dan memfasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang Penanganan konflik bekerjasama dengan instansi/lembaga dan satuan kerja terkait;
 - h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dibidang koordinasi Penanganan konflik;
 - i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas dibidang koordinasi penanganan konflik;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- 1.2.4 Bidang Politik Dalam Negeri, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :
- a) Unit Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b) Unit Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- j. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Pendidikan Politik, Etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik;
- k. Menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem implementasi politik;
- l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.



Unit Substansi dipimpin oleh Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas-tugas Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang Politik Dalam Negeri adalah :

a) Sub Koordinator Unit Substansi Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilpres, Pilkada skala Provinsi, pendidikan politik, etika budaya politik, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi;
- i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

b) Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
- b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menilai prestasi kerja bawahan;
- d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis tentang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik;
- i. Menyelenggarakan pengawasan fasilitasi kelembagaan pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

1.2.5 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa membawahi :

- a) Unit Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
- b) Unit Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.

Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;
- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Menilai prestasi kerja bawahan;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- h. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga dan satuan kerja terkait;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- i. Menyiapkan bahan masukan materi kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis dibidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan serta bekerjasama dengan instansi/lembaga dan satuan kerja terkait;
- j. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, bela negara, Karakter bangsa, Pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan serta bekerja sama dengan instansi/lembaga dan satuan kerja terkait;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Unit Substansi dipimpin oleh Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas-tugas Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa adalah :

- a) Sub Koordinator Unit Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - g. Menyiapkan bahan masukan materi kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - i. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
 - b) Sub Koordinator Unit Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. Menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di Sub Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah kebangsaan dan Karakter bangsa;
 - g. Menyiapkan bahan masukan kebijakan dan fasilitasi perumusan kebijakan teknis di Sub Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah kebangsaan dan Karakter bangsa;
 - h. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan di Sub Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah kebangsaan dan Karakter bangsa;
 - i. Memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Sub Bidang Bela Negara, Pembauran, Bhineka Tunggal Ika, Sejarah kebangsaan dan Karakter bangsa;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;
 - 1.2.6 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi :
 - a) Unit Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama; dan
 - b) Unit Substansi Organisasi Kemasyarakatan
- Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
 - b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
 - c. Mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang;



- d. Membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - g. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dibidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - i. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan di bidang Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - k. Menyelenggarakan pengawasan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa, dan Politik serta sistem Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- Unit Substansi dipimpin oleh Sub Koordinator Unit Substansi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Tugas-tugas Kepala Sub Bidang yang berada di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan adalah :
- a) Sub Koordinator Unit Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, mempunyai tugas :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

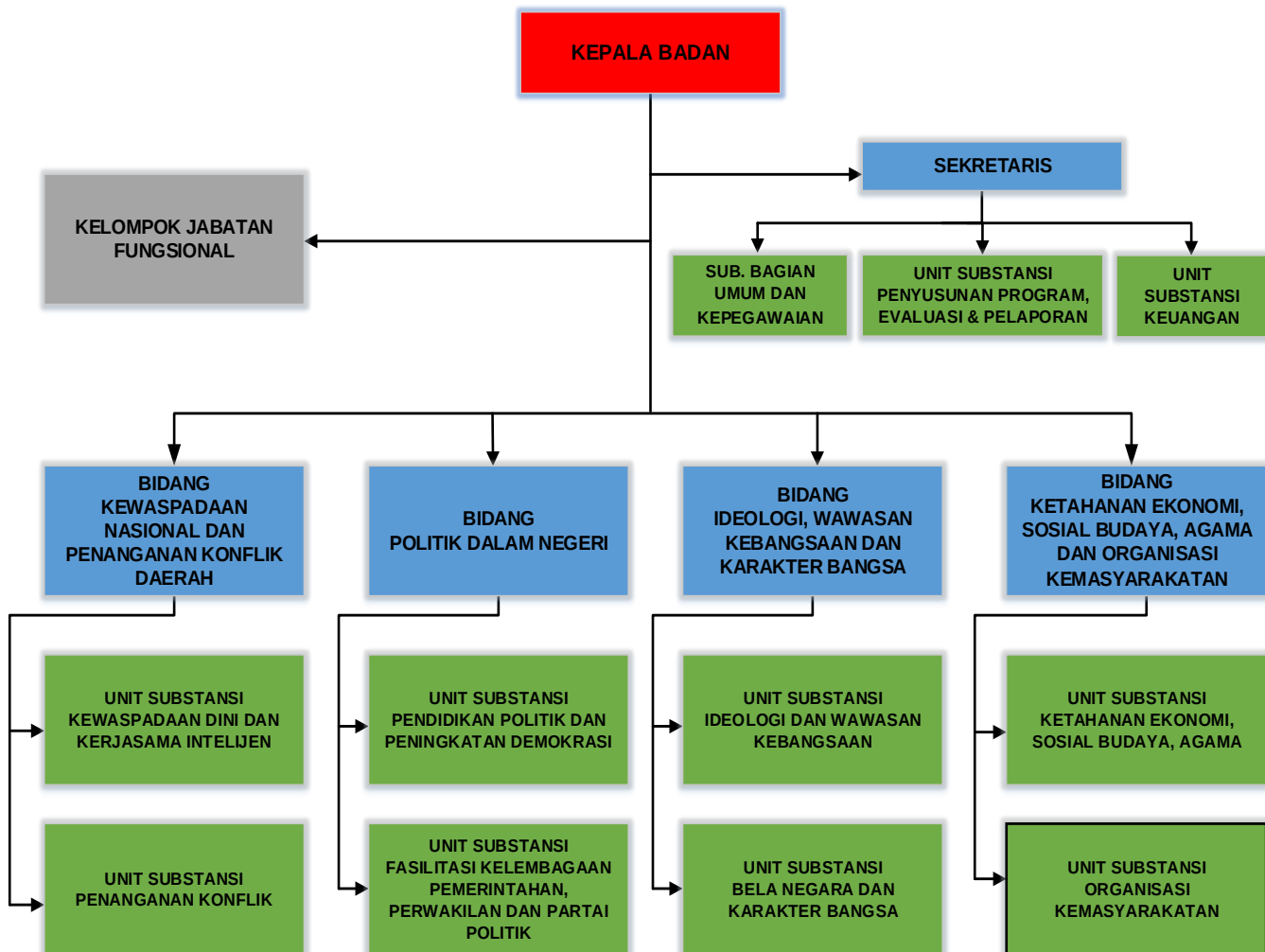
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - f. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - g. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - i. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap Ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- b) Sub Koordinator Unit Substansi Organisasi Kemasyarakatan, mempunyai tugas :
- a. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
 - b. Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;



- f. Menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis tentang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- g. Menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- i. Menyelenggarakan pengawasan pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang;

GAMBAR 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

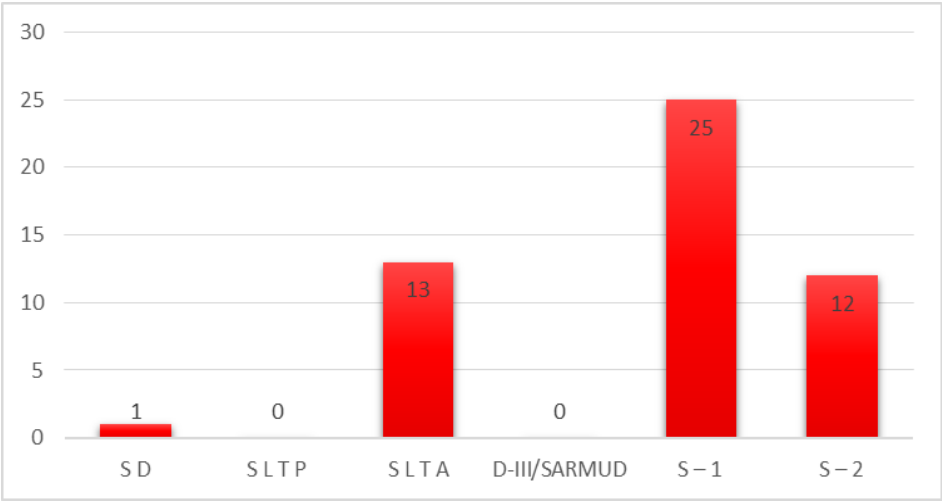
1.3 Keadaan Pegawai

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali memiliki sumber daya manusia sebanyak 51 orang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S D	1
2	S L T P	0
3	S L T A	13
4	D-III/SARMUD	0
5	S – 1	25
6	S – 2	12
Jumlah keseluruhan		51

Grafik 2.1
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali Berdasarkan Pendidikan



Tabel 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan Pangkat

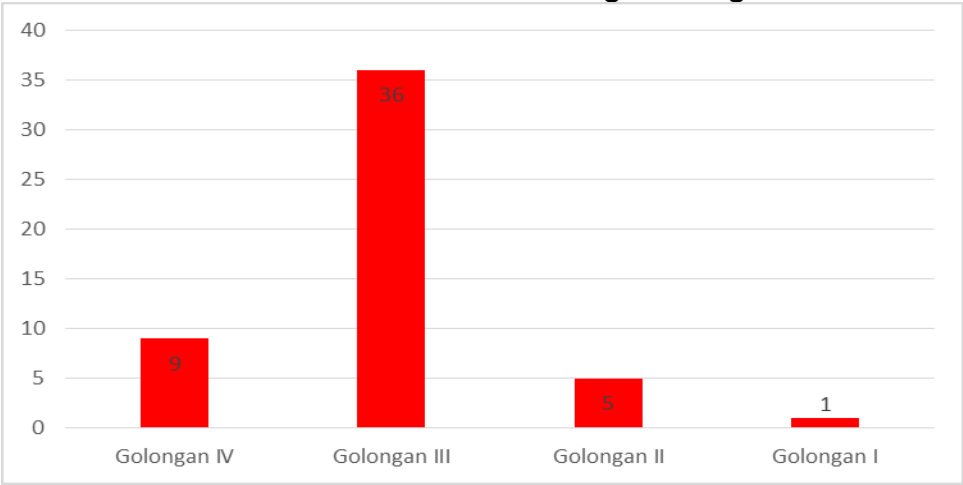
No.	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	9
2	Golongan III	36
3	Golongan II	5
4	Golongan I	1
Jumlah Keseluruhan		51



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

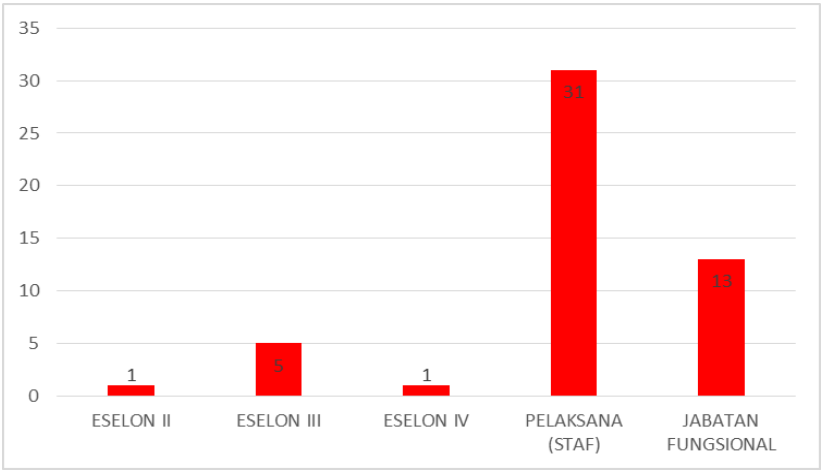
Grafik 2.2
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Golongan Pangkat



Tabel 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan

No.	Golongan	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	5
3	ESELON IV	1
4	PELAKSANA (STAF)	31
5	JABATAN FUNGSIONAL	13
Jumlah Keseluruhan		51

Grafik 2.3
Kualifikasi Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

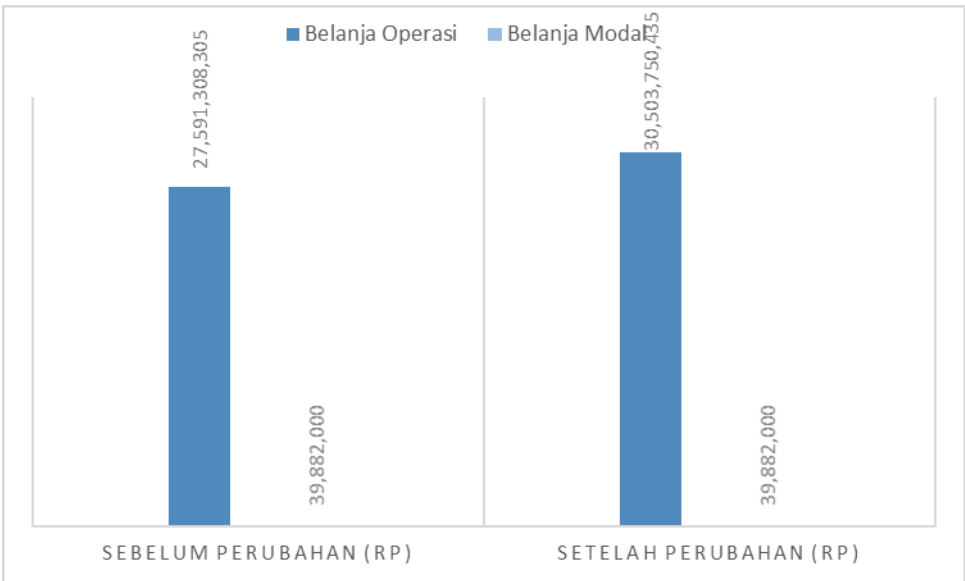
Pada Tahu 2022 Keadaan sarana dan prasarana penunjang kinerja cukup memadai. Rincian daftar aset tetap tahun anggaran 2022 terlampir.

1.5 Keuangan

Tabel 1.4
Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022

No.	Pagu Anggaran	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	Belanja Operasi	27.591.308.305	30.503.750.435
2	Belanja Modal	39.882.000	39.882.000
Jumlah Keseluruhan		27.631.190.305	30.543.632.435

Grafik 1.4
Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2021



Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.631.190.305,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 27.591.308.305,- dan Belanja modal sebesar Rp. 39.882.000,-. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2022, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.543.632.435,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 30.503.750.435,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 39.882.000,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

1.6 Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

1) Terwujudnya Sistem Keamanan Yang Terintegrasi

Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan hal universal, di mana semua individu mendambakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Untuk itu terlebih dahulu perlu ada *kesamaan pandang* tentang *wawasan* bila ingin diterapkan dalam konteks masa depan, terlebih bila dijadikan perspektif tatanan dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Dalam setiap kelompok masyarakat terdapat potensi-potensi konflik karena setiap warga masyarakat akan mempunyai kepentingan yang harus dipenuhi dengan mengorbankan kepentingan warga masyarakat lainnya, sehingga cenderung akan terjadi potensi konflik yang muncul dan berkembang dalam masyarakat yang berasal dari beberapa aspek bidang kehidupan yaitu ideologi, politik, ekonomi, social dan budaya, seperti kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat mengganggu stabilitas politik, kesenjangan antar daerah secara geografi maupun demografi sangat beragam, batas wilayah yang sering menjadi pemicu konflik antar masyarakat yang bertentangan, serta pelaksanaan pemilu maupun pemilukada cenderung menimbulkan suhu politik yang kurang kondusif. Sehingga dapat mengurangi potensi kerusuhan atau konflik yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Provinsi Bali, proses fasilitasi mediasi dan koordinasi sangat diperlukan dengan harapan mampu membantu pihak – pihak yang bertikai dalam mencari pemecahan masalah konflik yang mereka hadapi.

2) Meningkatnya Kecerdasan Masyarakat Dalam Kehidupan Berpolitik

Mengedepankan arah dan strategi serta kebijakan politik dalam negeri melalui penyempurnaan struktur politik, penataan peran negara dan masyarakat, pengembangan budaya politik, serta perbaikan proses politik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Partai politik sebagai pilar demokrasi mewujudkan sistem politik demokratis guna mendukung sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Penataan serta penyempurnaan partai politik diarahkan dalam rangka sikap dan perilaku yang terpolah atau sistematis sehingga terbentuk budaya politik yang mampu mendukung prinsip-prinsip dasar sistem politik demokratis dalam memaksimalkan fungsi partai politik itu sendiri, melalui pendidikan politik dan rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan dibidang politik dan memberi karya nyata untuk kemajuan masyarakat dan daerahnya.

3) Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Memantapkan dan memperkuat rasa kebangsaan, sehingga akan timbul semangat yang lebih tinggi terhadap persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya serta menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

4) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Perbedaan dan Toleransi Serta Kerjasama Antar Umat Beragama;

Dalam kehidupan umat beragama, sikap intoleransi terhadap budaya dan agama terkadang masih menjadi polemik dalam heterogenitas kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Dalam realitasnya, konflik akibat intoleransi sering terjadi dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis pada pemuliaan nilai-nilai agama, Forum Kerukunan Umat Beragama, memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam menjaga, memelihara hubungan secara kekeluargaan antar umat beragama. Sehingga kerja sama antar semua pihak sangat penting dalam mewujudkan dari sikap toleransi antar umat beragama.

1.7 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3).
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72).

1.8 Sistematika LKjIP

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL dan GRAFIK

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali

1.3 Keadaan Pegawai



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 1.4 Keadaan Sarana dan Prasarana
- 1.5 Keuangan
- 1.6 Aspek Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
- 1.7 Dasar Hukum
- 1.8 Sistematika LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
 - 2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Strategi dan Kebijakan
 - 2.1.3 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)
- 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- 2.3 Rencana Anggaran
 - 2.3.1 Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
 - 2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022
- 3.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra
- 3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja
- 3.6 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Sebagai salah satu instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali juga bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi kepala daerah, melaksanakan misi kepala daerah, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, serta dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis pada hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Bali saat ini serta untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan permasalahan dalam negeri 5 (lima) tahun kedepan dan untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2018-2023), maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah

" TERWUJUDNYA BALI YANG AMAN, TERTIB & DEMOKRATIS"

Untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali menetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatnya Keamanan Masyarakat

Sasaran strategis 1 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **"Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi"**

2) Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran strategis 2 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **"Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat"**

3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik

Sasaran strategis 3 tersebut di atas diukur dengan indikator sasaran **"Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu"**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Menciptakan sistem keamanan terpadu, memperkokoh kesatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman wawasan politik dalam negeri dengan memperhatikan nilai – nilai budaya Bali untuk mewujudkan Bali yang tentram, aman, tertib dan demokratis	1) Meningkatnya Keamanan Masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88	100
		2) Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16,6	16,6
		3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78	78
		4) Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	95%
INDIKATOR PENDUKUNG :					
		5) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	84

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

1) Sasaran 1 (Meningkatnya Keamanan Masyarakat)

- Indikator** : Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi
- Strategi** : Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota.
- Kebijakan** : Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang terintegrasi dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
- Program** : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
- Kegiatan** : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial



2) Sasaran 2 (Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa)

Indikator : Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat.

Strategi : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi.

Kebijakan : Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya serta menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Program : Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

3) Sasaran 3 (Meningkatnya Partisipasi & Keberdayaan Masy. dibidang Politik)

Indikator : Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Strategi : Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik

Kebijakan : Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.

Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

4) Sasaran 4 (Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan)

Indikator : Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Strategi : Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi

Kebijakan : Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya setra menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

Program : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

5) Indikator Lainnya (Sekretariat)

Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Strategi : Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip *Clean Government dan Good Governance*.

Kebijakan : Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menciptakan sistem keamanan terpadu, memperkuat kesatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman wawasan politik dalam negeri dengan memperhatikan nilai – nilai budaya Bali untuk mewujudkan Bali yang tentram, aman, tertib dan demokratis	1.) Meningkatnya keamanan masyarakat	Mewujudkan sistem keamanan berstandar Internasional untuk menciptakan kondisi Bali yang aman dan kondusif di 9 Kab/kota	Mengembangkan sistem keamanan Terpadu yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
		2.) Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi	Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya setra menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
		3.) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di bidang Politik	Meningkatkan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik melalui pembinaan lembaga kemasyarakatan dan LSM	Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan peran masyarakat dalam berpolitik, melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta bekerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, Media massa dan partai politik.
		Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat dan Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang Kesadaran Bela Negara dan Ideologi	Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan di Bali khususnya setra menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.
Indikator Lainnya :				
		4.) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Menciptakan pelayanan administrasi perkantoran yang berprinsip <i>Clean Government dan Good Governance</i> .	Meningkatkan kualitas SDM di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai



2.1.3 Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk Tahun 2022 mengangkat isu-isu strategis antara lain:

- 1) Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa,
- 2) Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat di Provinsi Bali,
- 3) Menurunnya kesadaran sebagai sebuah bangsa yang *Multi Culture* secara nasional yang akhirnya berimbas ke daerah,
- 4) Masih rentannya stabilitas politik dan keamanan dimasa Covid-19 dan kecenderungan opini negatif di Media sosial serta terbatasnya Pendidikan Politik pada masyarakat dan generasi muda,
- 5) Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali,
- 6) Belum optimalnya pemantauan Ormas dan masih banyaknya Ormas yang belum melaporkan keberadaannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Untuk menjawab dari isu strategis Tahun 2022 tersebut maka ditetapkanlah sasaran strategis. Sasaran hakekatnya menunjukkan apa yang hendak dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sebagai jawaban atas isu-isu strategis yang dihadapi. Untuk mendukung terwujudnya Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, maka di tetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Sesuai dengan Usulan Renstra Perubahan Tahun 2021-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
				2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Menciptakan sistem keamanan terpadu, memperkuat kesatuan bangsa dan meningkatkan pemahaman wawasan politik dalam negeri dengan memperhatikan nilai – nilai budaya Bali untuk mewujudkan Bali	1) Meningkatnya Keamanan Masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88	100
		2) Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dan Berpendapat	16,6	16,6
		3) Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78	78



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

	yang tentram, aman, tertib dan demokratis	4) Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	95%
INDIKATOR PENDUKUNG :					
		5) Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	84

Untuk mencapai target dari 5 sasaran strategis tersebut pada Tahun 2022 dilaksanakannya 5 program beserta kegiatannya melalui Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Tahun 2022 yang meliputi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya serta Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial, dengan rincian target kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Target Kinerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022		
				K		Rp
1	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.543.632.435,00
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10.955.760.267,00
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	9.330.380,00
	8.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	6.936.980,00
	8.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	2.393.400,00
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100	%	9.241.972.026,00
	8.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	9.241.972.026,00
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100	%	256.932.645,00
	8.01.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	tahun	1.693.095,00
	8.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100	%	41.213.750,00
	8.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1	tahun	80.000.000,00
	8.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan biaya foto copy	1	tahun	25.155.800,00
	8.01.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	5.000.000,00
	8.01.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	tahun	3.750.000,00
	8.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	100.120.000,00



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	%	780.599.616,00
8.01.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	250	lembar	2.500.000,00
8.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM	1	tahun	116.000.000,00
8.01.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1	tahun	662.099.616,00
8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100	%	666.925.600,00
8.01.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	466.970.400,00
8.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100	%	180.025.200,00
8.01.01.1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	100	%	19.930.000,00
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	90	%	612.919.596,00
8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	612.919.596,00
8.01.02.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dokumen	612.919.596,00
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	16.747.420.284,00
8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	16.747.420.284,00



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8.01.03.1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	dokumen	16.747.420.284,00
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,60	%	1.942.878.744,00
8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	1.942.878.744,00
8.01.05.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan	2	dokumen	1.942.878.744,00
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00
8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00
8.01.06.1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	284.653.544,00

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja instansi mengacu pada RPJMD, IKU, Renstra, Renja, RKT, RKA dan DPA. PK Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka Kriminalitas	2.731
2	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum dan Budaya Politik Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Indeks Demokrasi	81,00

Perjanjian Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan indikator tujuan yang sesuai dengan RPJMD Perubahan Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

2.3 Rencana Anggaran

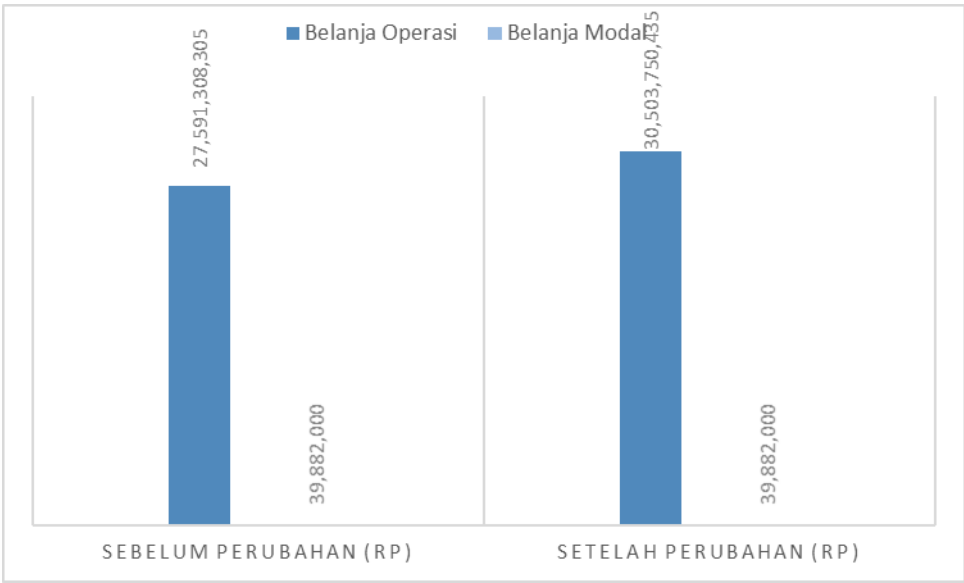
Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.631.190.305,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 27.591.308.305,- dan Belanja modal sebesar Rp. 39.882.000,-. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2022, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.543.632.435,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 30.503.750.435,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 39.882.000,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

2.3.1 Target Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Tabel 2.6
Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022

No.	Pagu Anggaran	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)
1	Belanja Operasi	27.591.308.305	30.503.750.435
2	Belanja Modal	39.882.000	39.882.000
Jumlah Keseluruhan		27.631.190.305	30.543.632.435

Grafik 2.1
Pagu Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali
Tahun Anggaran 2022



Tabel 2.7
Ringkasan Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	30.543.632.435	27.571.610.867	90,27	2.972.021.568
5.1.	BELANJA OPERASI	30.503.750.435	27.565.010.867	90,37	2.938.739.568
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.242.482.026	8.451.762.052	91,44	790.719.974
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.932.026	3.522.156.362	93,23	255.775.664
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.374.640.000	4.866.455.690	90,54	508.184.310
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.910.000	63.150.000	70,24	26.760.000
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.399.809	2.645.393.815	87,21	388.005.994
5.1.02.01.	Belanja Barang	551.191.065	506.433.064	91,88	44.758.001
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.592.279.096	1.358.151.545	85,30	234.127.551
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	405.231.648	386.090.636	95,28	19.141.012
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	417.198.000	327.218.570	78,43	89.979.430
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.500.000	67.500.000	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	18.227.868.600	16.467.855.000	90,34	1.760.013.600
5.1.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.760.013.600	-	-	1.760.013.600
5.1.05.08.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000	16.467.855.000	100,00	33.282.000
5.2.	BELANJA MODAL	39.882.000	6.600.000	16,55	33.282.000
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.882.000	6.600.000	16,55	33.282.000
5.2.02.05.	Belanja Modal Komputer	19.882.000	6.600.000	33,20	13.282.000
5.2.02.10.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-	-	20.000.000
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.543.632.435)	(27.571.610.867)	90,27	(2.972.021.568)



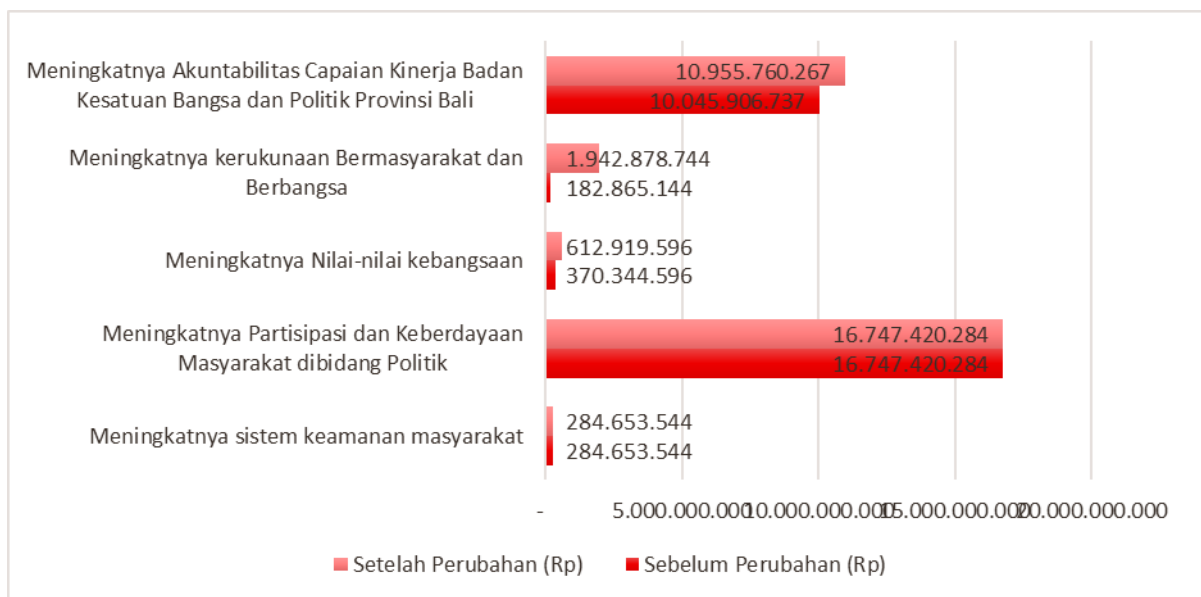
2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan bangsa dan Politik Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8
Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis

No.	Sasaran	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Perubahan (Rp)	Persentase dari Total Pagu Anggaran (%)
1	Meningkatnya sistem keamanan masyarakat	284.653.544	284.653.544	-	0,93
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	16.747.420.284	16.747.420.284	-	54,83
3	Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	370.344.596	612.919.596	242.575.000	2,01
4	Meningkatnya kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	182.865.144	1.942.878.744	1.760.013.600	6,36
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	10.045.906.737	10.955.760.267	909.853.530	35,87
TOTAL		27.631.190.305	30.543.632.435	2.912.442.130	100

Grafik 2.3.B
Anggaran Belanja Langsung per sasaran Strategis



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban, keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna menciptakan tata kelola Pemerintahan yang efektif, bersih dan bertanggungjawab.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi kinerja.

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dilakukan dengan cara :

1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Rincian tingkat capaian kinerja masing masing indikator kinerja sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Antara Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Perbandingannya dengan Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2021		2022			Target Akhir Tahun Renstra 2023	Capaian s/d 2022 terhadap 2023
			Target	Realiasi	Target	Realiasi	Capaian %		
	Tujuan Strategis								
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka Kriminalitas	3200	2602	2731	1793,00	152,31%	2262	126,16%
2	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum dan Budaya Politik Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Indeks Demokrasi	81,00	77,59	81	75,35	93,02%	81	93,02%
	Sasaran Strategis								
1	Meningkatnya sistem keamanan masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	77%	77%	88%	88%	100%	100%	88,00%
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78%	-	78%	-	-	78%	-
3	Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	-	-	90%	90%	100%	95%	94,74%
4	Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	16,6%	16,60%	100	16,6%	100,00%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,00	82,92	83	83,23	100,28%	84	99,08%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk masing – masing tujuan strategis dan sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik denga tercapainya target kinerja tersebut. Namun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

3.2 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dengan indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukurnya, tergambar secara umum capaian kinerja dari indikator kinerja utama tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam renstra Tahun 2018 - 2023 dimana realisasi target yang ditetapkan di tahun 2022 untuk masing – masing tujuan strategis dan sasaran strategis dengan indikator kinerja, realisasinya rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik dengan tercapainya target kinerja tersebut. Namun masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai sesuai dengan kondisi akhir periode Renstra Tahun 2018-2023 seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.

3.3 Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.631.190.305,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 27.591.308.305,- dan Belanja modal sebesar Rp. 39.882.000,-. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2022, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.543.632.435,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 30.503.750.435,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 39.882.000,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Penambahan jumlah anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kinerja dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, akan tetapi seperti dijelaskan pada Tabel 3.1 masih terdapat beberapa target kinerja yang masih belum tercapai seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.

Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2021 dapat dilihat dari 3 aspek sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Nilai IDI Tahun 2021 Provinsi Bali

No	Variabel Indeks Demokrasi	Nilai
1	Aspek Kebebasan	84,62
2	Aspek Kesetaraan	77,25
3	Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	63,92
IDI Komposit 2021		75,35

Sumber : BPS Provinsi Bali, 2022

Target kinerja Indeks demokrasi yang tidak tercapai di tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh rendahnya nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin. Akan tetapi aspek kebebasan sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik yang bernilai 84,62 poin. Walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Capaian Nilai IDI sudah dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2021.

Capaian indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022. Walaupun di Tahun 2022 tidak terdapat data realisasi dari indikator tersebut, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di tahun 2022 tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapaian kinerja pada tahun 2022 untuk



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Tabel 3.3 Capaian IDI Provinsi Bali Menurut Indikator

Aspek	Indikator/Indicator	2021
Kebebasan	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat oleh aparat negara <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion by state officials</i>	93,95
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat antar masyarakat <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, and opinion among communities</i>	84,89
	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan / <i>Guaranteed freedom of belief</i>	89,92
	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan <i>Guaranteed freedom of assembly, association, expression, opinion, and belief in every policy</i>	90,00
	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu untuk seluruh kelompok masyarakat <i>Guaranteed right to vote and be elected in elections</i>	99,24
	Pemenuhan hak-hak pekerja / <i>Fulfillment of workers' rights</i>	50,80
	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya <i>A free press in carrying out its duties and functions</i>	75,72
Kesetaraan	Kesetaraan gender / <i>Gender equality</i>	95,17
	Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan <i>Community participation in influencing public policy through representative institutions</i>	36,36
	Anti monopoli sumber daya ekonomi / <i>Antimonopoly of economic resources</i>	69,33
	Akses warga miskin pada perlindungan dan Jaminan sosial <i>Access of the poor to social protection and security</i>	81,44
	Kesetaraan kesempatan kerja antar wilayah / <i>Equality of job opportunities between regions</i>	94,63
	Akses masyarakat terhadap informasi publik / <i>Public access to public information</i>	83,29
	Kesetaraan dalam pelayanan dasar provinsi / <i>Equality in basic services</i>	81,22
Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kinerja lembaga legislatif / <i>Performance of the legislative</i>	58,33
	Kinerja lembaga yudikatif / <i>Performance of the judiciary</i>	84,28
	Netralitas penyelenggara pemilu / <i>Neutrality election organizers</i>	70,00
	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah <i>Decisions of the State Administrative Court (PTUN) regarding government officials' policies</i>	85,00
	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat <i>Government guarantees the preservation of the environment and people's living spaces</i>	70,70



Transparansi anggaran dalam bentuk penyediaan informasi APBN/D oleh pemerintah <i>Budget transparency in the form of providing information on APBN/D by the government</i>	28,57
Kinerja birokrasi dalam pelayanan publik / <i>Bureaucratic performance in public services</i>	66,80
Pendidikan politik pada kader partai politik / <i>Political education for political party cadres</i>	45,71
Skor:	75,35

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada salah satunya dapat dilihat dari indikator aspek kebebasan dari IDI Provinsi Bali Tahun 2021. Hal tercermin dari nilai indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang sudah mendapatkan nilai yang dapat terbilang baik dalam capaiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerukunan berbangsa dan bernegara.

Selain permasalahan tersebut, yang menjadi permasalahan lainnya pada pelaksanaan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

➤ Permasalahan dalam pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah Provinsi yaitu :

1. Masih kurangnya pemahaman ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali mengenai penerapan SAKIP yang baik, sehingga dapat mendukung tujuan organisasi.
2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas.
3. Kurang optimalnya pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas akibat keterbatasan anggaran yang ada.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Perlu dilakukan sosialisasi penerapan SAKIP yang baik ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.
2. Melakukan pengajuan kepada BKPSDM Provinsi Bali guna dapat mengisi pos jabatan yang kosong.
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal.

➤ Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Menurunnya pemahaman masyarakat terhadap empat konsensus dasar Bangsa.
2. Masih minimnya pembinaan nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan penolakan terhadap Pancasila.
3. Belum optimalnya dalam penguatan ideologi, wawasan kebangsaan, revolusi mental.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Melaksanakan bimbingan teknis berupa seminar wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah yang dilakukan dalam rangkaian penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
2. Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
3. Melaksanakan Forum Pembauran Kebangsaan.
4. Pelaksanan peringatan Hari Besar di Provinsi Bali.

- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah :

1. Kurangnya informasi perkembangan politik di daerah.
2. Terbatasnya pendidikan politik di masyarakat.
3. Turunnya capaian Indeks Demokrasi Provinsi Bali Tahun 2021.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :

1. Dukungan anggaran untuk pemantauan dan perkembangan politik di daerah.
2. Dukungan anggaran pendidikan politik masyarakat.
3. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Provinsi Bali.

- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Meningkatnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat kebebasan berserikat berkumpul dan berpendapat.
2. Maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Bali
3. Rendahnya kesadaran ormas untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.

Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

1. Pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
 2. Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial yaitu :
1. Urgensi peningkatan kewaspadaan daerah yang dapat mengganggu stabilitas nasional.
 2. Radikalisme & terorisme masih tetap berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman & ketertiban masyarakat di Provinsi Bali.
 3. Masih adanya potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.
- Upaya dalam mengatasi permasalahan yaitu:
1. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
 2. Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
 3. Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
 4. Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.

3.4 Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi merupakan memaksimalkan hasil dari sebuah pekerjaan dengan sedikit sumber daya berupa dana, tenaga, atau waktu. Melihat dari pengertian tersebut, dalam hal ini berarti semakin sedikit sumber daya atau dana yang digunakan dalam suatu usaha atau proses, maka akan dikatakan semakin efisien. Efisiensi merupakan suatu perbandingan antara sumber daya yang digunakan dalam suatu proses melakukan usaha atau pekerjaan, dengan hasil yang dicapai. Semakin sedikit sumber daya yang digunakan, seperti tenaga, waktu, dan biaya, tapi tetap dapat menghasilkan *output* sesuai dengan rencana atau harapan, maka akan dinilai semakin efisien. Kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tentunya dalam pelaksanaan anggaran Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sudah mencoba melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada terutama dalam penggunaan anggaran yang ada, hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 3.3. bahwa terdapat 2 program dalam penggunaan anggaran yang dapat dikategorikan sangat efisien dan 2 program yang dalam penggunaan anggarannya dapat dikategorikan cukup efisien sementara 1 program yang penggunaan anggarannya tidak dapat dikategorikan dikarenakan dalam realisasi capaian kinerja tidak terdapat realisasi seperti penjelasan pada sub bab sebelumnya.

Tabel 3.4. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2022			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran	Realisasi	Capaian %			
1	Meningkatnya sistem keamanan masyarakat	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88%	88%	100%	284.653.544	267.016.067	93,80%	0,06	65,49%	Cukup Efisien
2	Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	78%	-	0%	16.747.420.284	16.733.161.550	99,91%	-	-	Tidak Dapat Dikategorikan
3	Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	90%	100%	612.919.596	399.968.746	65,26%	0,35	136,86%	Sangat Efisien
4	Meningkatnya Kerukunaan Bermasyarakat dan Berbangsa	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,60%	100%	1.942.878.744	149.290.712	7,68%	0,92	280,79%	Sangat Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83,23	100,28%	10.955.760.267	10.022.173.792	91,48%	0,09	71,94%	Cukup Efisien
TOTAL						30.543.632.435	27.571.610.867	90,27%			

3.5 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Analisis kinerja didasarkan atas hasil pengukuran kinerja pelaksanaan program/kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran kinerja strategis tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar” mendukung pencapaian sasaran tersebut. Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang ingin di wujudkan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bali menetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Sasaran strategis 1 ;

Meningkatnya sistem keamanan masyarakat

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi, dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 3.5
Target dan Kinerja Sasaran 1

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Sistem Keamanan Terintegrasi	88%	88%	100%

Tabel diatas menunjukan bahwa indikator kinerja ini sudah mencapai target yang ditetapkan. Pemenuhan target pada sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi didukung oleh telah ditetapkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat. Adapun peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali untuk mendukung dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat adalah dengan menciptakan inovasi berupa Sistem Informasi Data Konflik (SIPELIK). SIPELIK ini pada tahun 2021 sudah berjalan dan sudah disosialisasikan ke Kabupaten/Kota di Provinsi Bali untuk dapat digunakan. Dalam pengoperasiannya SIPELIK ini mampu memberikan data mengenai potensi konflik yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sampai pada tingkat kecamatan. Sehingga dengan hadirnya SIPELIK ini pencapaian sasaran persentase sistem keamanan terintegrasi sudah dapat direalisasikan sesuai target di tahun 2022.

Pencapaian kinerja sebesar 100% dari target kinerja sistem keamanan terintegrasi salah satunya adalah dukungan dari capaian kegiatan dari Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial dengan pelaksanaan kegiatan yang menitikberatkan kepada kerjasama dan koordinasi dengan instansi vertikal untuk melakukan pengamanan di Provinsi Bali. Pengamanan di Provinsi Bali yang dilaksanakan sesuai dengan Tim Kerja yang dibentuk seperti : 1) Tim Kewaspadaan Dini di Daerah, 2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, 3) Tim Pemantauan Orang Asing dan 4) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Pembentukan Tim Kerja tersebut dilakukan bersama Instansi Vertikal yang terkait seperti : 1) Kodam IX Udayana, 2) Polda Bali, 3) Korem 163 Wira Satya, 4) Kejati Bali, 5) BINDA Bali, 6) Kanwil KumHam Bali, 7) Kanwil Kemenag Bali, 8) Lanal, 9) Lanud, 10) Bais TNI, 11) OPD Terkait.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1 adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00 bertujuan untuk meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial untuk menciptakan sistem keamanan terintegrasi. Indikator kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial adalah Persentase sistem keamanan terintegrasi dengan target sebesar 88%. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial sebesar 88% (100%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan bertujuan untuk merumuskan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase sistem keamanan terintegrasi dengan target sebesar 88% dengan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan target 3 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 284.653.544,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 267.016.067,00 (93,80%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (100%).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

b. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik.

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.6
Target dan Kinerja Sasaran 2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	78%	-	0%

Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, terkait pada tahun 2022 tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2022.

Akan tetapi sasaran kinerja tersebut dapat digambarkan secara umum dengan melihat nilai capaian dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Bali. IDI merupakan indikator Komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat untuk mengukur perkembangan demokrasi Indonesia sehingga diperoleh acuan untuk menyusun program pembangunan politik baik untuk pemerintah pusat maupun daerah. Metode pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 mengalami perubahan karena terdapat perubahan konsep demokrasi yang digunakan. Konsep yang digunakan pada Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 terbatas pada dimensi politik, sedangkan pada tahun 2021 juga mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2009-2020 hanya menghasilkan indeks tingkat provinsi dan nasional, sementara Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2021 menghasilkan indeks tingkat provinsi, pusat, dan nasional. Realisasi nilai IDI Tahun 2021 dapat dilihat dari 3 aspek dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Target kinerja Indeks demokrasi yang tidak tercapai di tahun 2022 salah satunya diakibatkan oleh rendahnya nilai dari Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang hanya bernilai 63,92 poin. Akan tetapi aspek kebebasan sudah memberikan sumbangsih yang cukup baik yang bernilai 84,62 poin. Walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

meningkatkan Capaian Nilai IDI sudah dilakukan yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya *Focus Group Discussion* (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat.

Capaian indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022. Walaupun di Tahun 2022 tidak terdapat data realisasi dari indikator tersebut, namun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali di tahun 2022 tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada untuk mendukung dari pencapaian kinerja pada tahun 2022 untuk peningkatan pendidikan masyarakat sehingga nantinya menjelang Pemilu di Tahun 2024 dapat menjamin hak memilih dan dipilih dari masyarakat tersebut. Terjaminnya hak memilih dan dipilih masyarakat tersebut tentunya akan dapat meningkatkan persentase partisipasi politik masyarakat.

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali akan terus melakukan kegiatan untuk mendukung capaian nilai IDI dengan berfokus kepada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi yang sebelumnya memberikan capaian nilai terendah pada IDI Komposit Provinsi Bali Tahun 2021. Inovasi kedepannya dengan kegiatan untuk meningkatkan nilai IDI kembali seperti dengan lebih menggiatkan Tim Kerja IDI dalam melaksanakan FGD IDI untuk dapat lebih bersinergi dalam meningkatkan nilai IDI di tahun depan serta untuk mencapai sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat di Bidang Politik khususnya untuk menyongsong Pemilukada tahun 2024. Adapun Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00 bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik. Indikator kinerja Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Adalah Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu dengan target sebesar 78 %. Realisasi capaian kinerja Program Peningkatan Peran Partai



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 0% (N/A atau tidak terdapat data). Indikator kinerja ini belum dapat mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2022, terkait pada tahun 2022 tidak terdapat pemilihan umum yang diselenggarakan sehingga persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu tidak bisa diukur khusus untuk tahun 2022.

Pada program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik walaupun target kinerja tidak dapat tercapai, tapi kegiatan dalam meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik tetap dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung seperti terlaksananya pencairan bantuan partai politik yang dilakukan tepat waktu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sehingga dengan pencairan bantuan partai politik yang tepat waktu tersebut partai politik dapat memberikan peran yang maksimal dalam pemanfaatan dari bantuan partai politik tersebut salah satunya dengan meningkatkan pendidikan politik baik itu masyarakat maupun kader internal partai politik. Selain itu di Tahun 2022 sudah terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) IDI, dan juga pelaksanaan pendidikan politik masyarakat. Realisasi anggaran dari program ini sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dilaksanakan bertujuan untuk Meningkatnya Partisipasi dan Keberdayaan Masyarakat dibidang Politik. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan target 2 dokumen. Serta anggaran sebesar Rp. 16.747.420.284,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 16.733.161.550,00 (99,91%) dan realisasi kinerja 3 dokumen (150%).

c. Sasaran strategis 3; Meningkatnya Nilai-nilai kebangsaan

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.7
Target dan Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	90%	90%	100%

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Nilai-nilai Kebangsaan dengan indikator Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan capaian 90%. Capaian sebesar 90% terseut didapatkan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

dari gambaran hasil pemahaman masyarakat yang mendapatkan sosialisasi Wawasan Kebangsaan yang paham akan Wawasan Kebangsaan. Pemahaman tersebut diukur melalui kuisisioner yang disebarakan kepada peserta sosialisasi, Masyarakat dikatakan paham akan wawasan kebangsaan ketika mereka dapat menjawab benar minimal 75% dari total pertanyaan yang disajikan. Hasil penyebaran kuisisioner tersebut memberikan hasil capaian dari Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila sebesar 90% tersebut.

Pencapaian sasaran kinerja Meningkatnya Nilai-nilai Kebangsaan sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis yaitu Pelaksanaan kegiatan Bulan Bung Karno, Peringatan hari lahir Pancasila, Pembentukan Gugus Tugas Revolusi Mental, Pelaksanaan Hari Bela Negara. Pelaksanaan kegiatan tersebut sangat kompleks dilaksanakan untuk dapat meningkatkan nilai-nilai kebangsaan dengan bentuk kegiatan yang berupa sosialisasi, bimtek dan forum tatap muka.

Dalam Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila. Indikator kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan adalah persentase meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan target sebesar 90%. Realisasi capaian kinerja Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan sebesar 90% (100%). Realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

- 1) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00. Realisasi kinerja sebesar 76,96% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah dengan target 1 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 612.919.596,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 399.968.746,00 (65,26%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (200%).

d. Sasaran strategis 4; Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8
Target dan Kinerja Sasaran 4

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Persentase Menurunnya Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul	16,6%	16,6%	100%

Sasaran Strategis 4, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa dilaksanakan melalui Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Untuk mencapai sasaran strategis 4, Meningkatnya Kerukunan Bermasyarakat dan Berbangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menjalankan beberapa kebijakan strategis yaitu Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Pencatatan keberadaan Ormas. Dengan terselenggaranya kegiatan di atas persentase Ancaman Kekerasan dari Kelompok Masyarakat terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul dapat



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

menurun 16,6% dalam skala 100%, sehingga pencapaian di tahun 2022 tercapai 100%.

Keberhasilan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Pada salah satunya dapat dilihat dari indikator aspek kebebasan dari IDI Provinsi Bali Tahun 2021 yang dapat dilihat pada Tabel 3.3. Hal tersebut tercermin dari nilai indikator Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat yang sudah mendapatkan nilai yang dapat terbilang baik dalam capaiannya. Hal tersebut tidak terlepas dari peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melalui Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas yang sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kerukunan berbangsa dan bernegara.

Dalam Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00 bertujuan untuk melakukan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya untuk menurunkan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat. Indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat dengan target penurunan sebesar 16,6 %. Realisasi capaian kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya dengan penurunan ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebesar 16,6% (100%). Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.290.712,00 (7,68%). Realisasi anggaran yang jauh dari target diakibatkan terdapat anggaran belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bali yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.760.013.600,00.

Kegiatan dalam program ini adalah :

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dilaksanakan bertujuan untuk melaksanakan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Indikator kinerja kegiatan adalah Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan target kinerja sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Realisasi kinerja sebesar 85,57% dan realisasi anggaran sebesar Rp.149.290.712,00 (7,68%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :

- 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan target kinerja Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 1.942.878.744,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.290.712,00 (7,68%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

e. Sasaran strategis 5; Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

Sasaran tersebut diukur dengan indikator *outcome* Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan tingkat capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.9
Target dan Kinerja Sasaran 5

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83	83,23	100,28%

Sasaran Strategis 5, Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dengan *outcome* Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja yang didapatkan melalui **Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)** pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Bali. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Inspektorat Provinsi Bali, **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021** memperoleh nilai sebesar **83,23** dengan kategori “**(A) – MEMUASKAN**”. Hasil penilaian atas masing-masing aspek dan komponen akuntabilitas kinerja secara rinci disajikan dalam Lampiran Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 3.10. Rincian Rekapitulasi Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2021

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1.	Perencanaan Kinerja	30	25,69
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,38
3.	Pelaporan Kinerja	15	14,81
4.	Evaluasi Internal	10	7,48
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	15,88
TOTAL		100	83,23

Beberapa hal yang perlu diperbaiki dari implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali sesuai dengan hasil evaluasi SAKIP tersebut di atas adalah sebagai berikut :

➤ Perencanaan Kinerja

- 1) Dokumen Renstra agar direviu secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan dengan disertai dokumentasi hasil reviu;
- 2) Rencana Aksi atas kinerja menjabarkan target kinerja ke dalam target periodik dan dipergunakan untuk mengukur keberhasilan serta dimonitor secara berkala.

➤ Pengukuran Kinerja

- 1) IKU agar direviu secara berkala disesuaikan dengan perkembangan.

➤ Pelaporan Kinerja

- 1) Menyempurnakan penyajian informasi kinerja LKjIP yang akan datang, antara lain menjelaskan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan dikaitkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen perencanaan jangka menengah atau Renstra, serta melakukan perbandingan data kinerja secara memadai, baik secara internal maupun eksternal, untuk menggambarkan prestasi dan posisi kinerja unit/organisasi;

➤ Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

- 1) Perencanaan Penetapan Target Capaian Kinerja agar diperhitungkan dengan baik sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai;
- 2) Capaian kinerja agar lebih baik dari tahun sebelumnya dan Informasi mengenai capaian kinerja dapat diandalkan.

Kedepannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali perlu melakukan pembenahan terhadap poin-poin yang menjadi hasil evaluasi SAKIP tersebut, sehingga penerapan SAKIP kedepannya dapat lebih baik lagi. Kegiatan untuk menunjang sasaran ini terdapat satu program yang mendukung sasaran strategis ini yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran sebesar



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Rp 10.955.760.267,00 bertujuan untuk meningkatnya nilai laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) dalam menunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi adalah Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan target nilai sebesar 83. Realisasi capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan nilai 83,23 (100,28%) dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.022.173.792,00 (91,48%).

Kegiatan dalam program ini adalah :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah jumlah dokumen penyusunan, perencanaan dan evaluasi perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 8 dokumen, dengan anggaran sebesar Rp. 9.330.380,00. Realisasi kinerja sebesar 8 dokumen (100%) dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.287.580,00 (88,82%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah sebanyak 6 dokumen dan anggaran sebesar Rp 6.936.980,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 5.991.680,00 (86,37%) dan realisasi kinerja 4 dokumen (100%).
- 2) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah sebesar 2 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 2.393.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.295.900 (95,93%) dan realisasi kinerja 2 dokumen (100%).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 9.241.972.026,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.451.762.052,00 (91,45%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan target kinerja jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan ASN dengan jumlah 70 dokumen dan anggaran sebesar Rp. 9.241.972.026,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 8.451.762.052,00 (91,45%) dan realisasi kinerja 70 dokumen (100%).



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan administrasi umum perangkat daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tugas administrasi umum terselesaikan dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 256.932.645,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 192.003.335,00 (74,73%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 1.693.095,00 Realisasi anggaran sebesar Rp 1.693.095,00 (100%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan target kinerja Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi dengan target 100% terpenuhi dan anggaran sebesar Rp 41.213.750,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 26.045.750,00 (63,20%) dan realisasi kinerja 67,51%.
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan target kinerja persentase terpenuhinya bahan logistik kantor selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 76.080.000,00 (95,10%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan target kinerja tersedianya barang cetak dan biaya foto copy selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 25.155.800,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 21.601.300,00 (85,87%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan target kinerja tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00 Realisasi anggaran sebesar Rp. 3.360.000,00 (67,20%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 6) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu, dengan target kinerja jumlah fasilitas kunjungan tamu selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 3.750.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.002.000,00 (53,39%) dan realisasi kinerja 100%.
- 7) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan target kinerja jumlah rapat koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun dan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

anggaran sebesar Rp. 100.120.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 61.221.190,00 (61,15%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 780.599.616,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 735.343.689,00 (94,20%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan target kinerja Jumlah jumlah materai yang tersedia sejumlah 250 lembar materai dan anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (100%) dan realisasi kinerja 250 lembar materai (100%).
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan target kinerja terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 116.000.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 80.579.977,00 (69,47%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan target kinerja jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu selama 1 tahun dan anggaran sebesar Rp. 662.099.616,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 652.263.712,00 (98,51%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).

e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan bertujuan untuk meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase pemeliharaan barang milik daerah terpenuhi dengan target kinerja sebesar 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 666.925.600,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 634.777.136,00 (95,18%).

Sub Kegiatan dalam Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan target kinerja persentase terpeliharanya kendaraan dinas dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 466.970.400,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 441.857.286,00 (94,62%) dan realisasi kinerja terpenuhi selama 1 tahun (100%).
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya peralatan dan mesin Lainnya dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 180.025.200,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 173.337.600,00 (96,29%) dan realisasi kinerja 100%.
- 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan target kinerja persentase terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan target sebesar 100% dan anggaran sebesar Rp. 19.930.000,00. Realisasi anggaran sebesar Rp. 19.582.250,00 (98,26%) dan realisasi kinerja 100%.

3.6 Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali didukung dengan anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali dimana pada Tahun Anggaran 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 27.631.190.305,- Dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 27.591.308.305,- dan Belanja modal sebesar Rp. 39.882.000,-. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dalam APBD sehingga jumlah anggaran kegiatan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pun mengalami perubahan. Perubahan anggaran tersebut melalui mekanisme perubahan APBD 2022, dengan total anggaran setelah perubahan menjadi Rp. 30.543.632.435,- dengan rincian Belanja operasi menjadi Rp. 30.503.750.435,- Serta Belanja modal menjadi Rp. 39.882.000,-. Perubahan tersebut dilakukan terkait adanya penambahan anggaran pada beberapa Sub Kegiatan dan juga adanya tambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali.

Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 27.571.610.867,- (90,27%) dengan rincian Belanja Operasi Rp 27.565.010.867,- (90,37%), Belanja Modal sebesar Rp. 6.600.000,- (16,55%). Sisa pagu anggaran Rp. 2.972.021.568,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 2.972.021.568,- dan Belanja Modal Rp. 33.282.000,-.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Tabel 3.11
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Sisa Pagu (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH	30.543.632.435	27.571.610.867	90,27	2.972.021.568
5.1.	BELANJA OPERASI	30.503.750.435	27.565.010.867	90,37	2.938.739.568
5.1.01.	Belanja Pegawai	9.242.482.026	8.451.762.052	91,44	790.719.974
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.777.932.026	3.522.156.362	93,23	255.775.664
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.374.640.000	4.866.455.690	90,54	508.184.310
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	89.910.000	63.150.000	70,24	26.760.000
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.399.809	2.645.393.815	87,21	388.005.994
5.1.02.01.	Belanja Barang	551.191.065	506.433.064	91,88	44.758.001
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.592.279.096	1.358.151.545	85,30	234.127.551
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	405.231.648	386.090.636	95,28	19.141.012
5.1.02.04.	Belana Perjalanan Dinas	417.198.000	327.218.570	78,43	89.979.430
5.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	67.500.000	67.500.000	100,00	-
5.1.05.	Belanja Hibah	18.227.868.600	16.467.855.000	90,34	1.760.013.600
5.1.05.07.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.760.013.600	-	-	1.760.013.600
5.1.05.08.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	16.467.855.000	16.467.855.000	100,00	33.282.000
5.2.	BELANJA MODAL	39.882.000	6.600.000	16,55	33.282.000
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.882.000	6.600.000	16,55	33.282.000
5.2.02.05.	Belanja Modal Komputer	19.882.000	6.600.000	33,20	13.282.000
5.2.02.10.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.000.000	-	-	20.000.000
5.Z.	SURPLUS/(DEFISIT)	(30.543.632.435)	(27.571.610.867)	90,27	(2.972.021.568)

***) Sumber data : LRA SIPKD Provinsi Bali, 2023**

Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 90,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 dapat dibilang sudah cukup baik untuk mencapai tujuan organisasi dimana jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian Sasaran Organisasi dengan capaian sebesar 98,42% yang memiliki capaian yang lebih tinggi dari capaian anggaran yang ada. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 lebih kecil jika dibandingkan realisasi pada Tahun Anggggaran 2021. Adapun realisasi anggaran di Tahun 2021 sebesar Rp. 20.691.875.174,- (94,01%) dengan rincian Belanja Operasi Rp 20.661.599.174,- (94,01%), Belanja Modal sebesar Rp. 30.276.000,- (91,81%). Sisa pagu anggaran Rp. 1.318.566.169,- terdiri dari Belanja Operasi Rp. 1.315.866.169,- dan Belanja Modal Rp. 2.700.000,-.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Anggaran dan realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2022 (sampai dengan bulan Mei)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	
				7			8			9 = (8/7) x 100%	
1	2	3	4	K		Rp	K		Rp	K	Rp
1	8,01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				30.543.632.435,00			27.571.610.867,00		90,27%
	8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	10.955.760.267,00	83,23	nilai	10.022.173.792,00	100,28%	91,48%
	8.01.01. 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai evaluasi manajemen kinerja	83	nilai	9.330.380,00	83,23	nilai	8.287.580,00	100,28%	88,82%
	8.01.01. 1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen penyusunan dan perencanaan perangkat daerah	6	dokumen	6.936.980,00	6	dokumen	5.991.680,00	100%	86,37%
	8.01.01. 1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	2	dokumen	2.393.400,00	2	dokumen	2.295.900,00	100%	95,93%
	8.01.01. 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	100	%	9.241.972.026,00	100	%	8.451.762.052,00	100,00	91,45%
	8.01.01. 1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah dokumen spp/spm gaji dan tunjangan asn	70	dokumen	9.241.972.026,00	70	dokumen	8.451.762.052,00	100%	91,45%
	8.01.01. 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase tugas administrasi umum terselesaikan	100	%	256.932.645,00	100	%	192.003.335,00	100,00%	74,73%
	8.01.01. 1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	tahun	1.693.095,00	12	Bulan	1.693.095,00	100,00%	100,00%
	8.01.01. 1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhi	100	%	41.213.750,00	67,51	%	26.045.750,00	67,51%	63,20%
	8.01.01. 1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya bahan logistik kantor	1	tahun	80.000.000,00	12	Bulan	76.080.000,00	100,00%	95,10%
	8.01.01. 1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan biaya foto copy	1	tahun	25.155.800,00	12	Bulan	21.601.300,00	100,00%	85,87%
	8.01.01. 1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	1	tahun	5.000.000,00	12	Bulan	3.360.000,00	100,00%	67,20%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8.01.01. 1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah fasilitasi kunjungan tamu	1	tahun	3.750.000,00	12	Bulan	2.002.000,00	100,00%	53,39%
8.01.01. 1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	1	tahun	100.120.000,00	12	Bulan	61.221.190,00	100,00%	61,15%
8.01.01. 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase tersedianya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	100	%	780.599.616,00	100	%	735.343.689,00	100,00%	94,20%
8.01.01. 1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	250	lembar	2.500.000,00	250	lembar	2.500.000,00	100%	100,00%
8.01.01. 1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terbayarnya langganan telepon, listrik dan air PDAM	1	tahun	116.000.000,00	12	Bulan	80.579.977,00	100,00%	69,47%
8.01.01. 1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor yang di bayar tepat waktu	1	tahun	662.099.616,00	12	Bulan	652.263.712,00	100,00%	98,51%
8.01.01. 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase barang milik daerah dalam keadaan baik	100	%	666.925.600,00	100,00	%	634.777.136,00	100,00%	95,18%
8.01.01. 1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	persentase terpeliharanya kendaraan dinas	100	%	466.970.400,00	100	%	441.857.286,00	100,00%	94,62%
8.01.01. 1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	persentase terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100	%	180.025.200,00	100	%	173.337.600,00	100,00%	96,29%
8.01.01. 1.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	persentase pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor terpenuhi	100	%	19.930.000,00	100	%	19.582.250,00	100,00%	98,26%
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Meningkatnya pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai - Nilai Pancasila	90	%	612.919.596,00	90	%	399.968.746,00	100,00%	65,26%
8.01.02. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	%	612.919.596,00	76,96	%	399.968.746,00	76,96	65,26%
8.01.02. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan	jumlah dokumen hasil pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1	Dokumen	612.919.596,00	2	Dokumen	399.968.746,00	200,00%	65,26%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	78	%	16.747.420.284,00	0	%	16.733.161.550,00	0%	99,91%
8.01.03. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100	%	16.747.420.284,00	100	%	16.733.161.550,00	100%	99,91%
8.01.03. 1.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2	dokumen	16.747.420.284,00	3	dokumen	16.733.161.550,00	150%	99,91%
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	persentase menurunnya ancaman kekerasan dari kelompok masyarakat terhadap kebebasan berserikat,berkumpul dan berpendapat	16,60	%	1.942.878.744,00	16,6	%	149.290.712,00	100%	7,68%
8.01.05. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Progres Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100	%	1.942.878.744,00	85,57	%	149.290.712,00	85,57	7,68%
8.01.05. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial,budaya dan fasilitas pencegahan	2	dokumen	1.942.878.744,00	2	dokumen	149.290.712,00	100%	7,68%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00	88	%	267.016.067,00	100%	93,80%
8.01.06. 1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	persentase sistem keamanan terintegrasi	88	%	284.653.544,00	88	%	267.016.067,00	100%	93,80%
8.01.06. 1.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dokumen	284.653.544,00	3	dokumen	267.016.067,00	100%	93,80%



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

BAB 4

PENUTUP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022, serta penetapan Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka mewujudkan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Tahun Keempat dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali tahun 2019-2023. Keberhasilan yang dicapai merupakan berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil dari LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana.
- 2) Dari analisis 5 (lima) sasaran, terdapat 4 (empat) yang tercapai dan 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai, dimana realisasi capaian kinerja dari sasaran tersebut rata-rata sudah memberikan hasil kinerja yang baik dengan tercapainya target kinerja tersebut. Target kinerja yang masih belum tercapai seperti target kinerja pada tujuan strategis dengan indikator Indeks Demokrasi yang cenderung turun dari Tahun 2021 dan 2022. Serta pada indikator sasaran strategis dengan indikator persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu yang tidak terdapat data dalam realisasinya, karena tidak terdapat pemilu di tahun 2022.
- 3) Penyerapan anggaran Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2022 sebesar 90,27% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali Tahun 2022 dapat terbilang sudah cukup baik untuk mencapai tujuan organisasi dimana jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian Sasaran Organisasi dengan capaian sebesar 98,42% yang memiliki capaian yang lebih



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

tinggi dari capaian anggaran yang ada. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2021, realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 lebih kecil jika dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2021.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan periode yang akan datang. Beberapa langkah kedepan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu dilakukan sosialisasi penerapan SAKIP yang baik ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali, sesuai dengan perbaikan dari LHE SAKIP dari Inspektorat Provinsi Bali.
- 2) Melakukan pengajuan kepada BKPSDM Provinsi Bali guna dapat mengisi pos jabatan yang kosong, sehingga dengan terisinya pos jabatan yang kosong serta meningkatnya kemampuan ASN dalam mencapai kinerja juga akan dapat mendukung kinerja organisasi.
- 3) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara optimal untuk mendukung capaian kinerja.
- 4) Melaksanakan bimbingan teknis berupa seminar wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi kepada masyarakat melalui para tokoh masyarakat, kepada organisasi kemasyarakatan maupun aparatur pemerintah yang dilakukan dalam rangkaian penyelenggaraan Bulan Bung Karno yang diselenggarakan serentak juga pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- 5) Memaksimalkan anggaran yang tersedia untuk kegiatan Bulan Bung Karno untuk secara tidak langsung melaksanakan penguatan wawasan kebangsaan, revolusi mental dan penguatan ideologi.
- 6) Melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila seperti melaksanakan Forum Pembauran Kebangsaan serta Pelaksanaan peringatan Hari Besar di Provinsi Bali.
- 7) Mengupayakan untuk mendapatkan dukungan anggaran untuk pemantauan dan perkembangan politik di daerah, anggaran pendidikan politik masyarakat, serta anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Indeks Demokrasi Provinsi Bali.
- 8) Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa dan kerukunan hidup beragama melalui fasilitasi terhadap ormas yang bergerak dibidangnya seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).



- 9) Meningkatkan kesadaran dari ormas tentang pentingnya untuk melaporkan keberadaanya di Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
- 10) Memberdayakan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kewaspadaan dalam menyikapi munculnya permasalahan situasi kondisi daerah.
- 11) Melaksanakan koordinasi intelijen daerah secara intensif.
- 12) Melaksanakan kegiatan pemantauan secara intensif terhadap kemungkinan aksi terorisme serta kegiatan kelompok radikal lainnya.
- 13) Meningkatkan koordinasi aparat keamanan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWA PUTU MANTERA, SH., MH.

Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER

Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 03 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI BALI

WAYAN KOSTER



DEWA PUTU MANTERA, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621231 198503 1 192



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	Angka Kriminalitas	2,731
2	Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Demokratis Dan Berkeadilan Dengan Memperkuat Budaya Hukum dan Budaya Politik Dengan Memperhatikan Nilai-Nilai Budaya Bali.	Indeks Demokrasi	81.00

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	284,653,544	APBD
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp	16,747,420,284	APBD
3	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	182,865,144	APBD
4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	370,344,596	APBD
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	10,045,906,737	APBD
TOTAL		Rp	27,631,190,305	

Denpasar, 03 Januari 2022

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI

DEWA RUTU MANTERA, SH., MH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19621231 198503 1 192



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE